

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1 Kesimpulan umum

Secara umum Akuntabilitas Kebijakan Hunian Tetap (Huntap) Korban Erupsi Merapi 2010 di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman sudah baik/akuntabel. Hal ini dikarenakan 2 (dua) dari 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas yang dijadikan indikator dalam pembahasan penelitian ini sudah baik/akuntabel. Adalah akauntabilitas teknis dan akuntabilitas strategis yang menunjukkan hasil baik/akuntabel, semntara akuntabilitas politik saja yang menunjukkan belum baik/belum akuntabel.

2 Kesimpulan Khusus

a) Akuntabilitas teknis (*input, Output dan akunting*)

Tingkatan akuntabilitas teknis dalam kebijakan Huntap bagi korban erupsi Merapi tahun 2010 menunjukkan hasil yang paling baik/akuntabel. Secara teknis (*input, Output dan akunting*) pelaksanaan kebijakan Huntap sudah sangat akuntabel. Seluruh indikator yang menjadi alat ukur akuntabilitas telah terlaksana dengan baik dari mulai perencanaan, pembangunan, penempatan, hingga pelaporan dilakukan dan terdokumenkan dengan sangat akuntabel dengan pendekatan partisipatoris dari masyarakat. Dengan pendekatan partisipasi, warga masyarakat menjadi pelaku utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan Huntap, penyusunan anggaran, pelaksana pembangunan, penempatan hingga pelaporan

kegiatan. Dengan kata lain setiap kegiatan teknis dari pembangunan Huntap ini dikerjakan oleh masyarakat, direncanakan oleh masyarakat, menggunakan material lokal dan juga diawasi oleh masyarakat. Pemerintah melalui REKOMPAK berfungsi sebagai fasilitator dalam penyediaan dana bantuan, pengadaan lahan Huntap, penguatan kapasitas bagi warga masyarakat, dan monitoring kegiatan.

b) Akuntabilitas Strategis (*outcome*)

Akuntabilitas strtegis menjadikan manfaat (*Outcome*) dari sebuah kebijakan sebagai tolok ukur dari akauntabel atau tidaknya dari kebijakan tersebut. Manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat korban erupsi Merapi terhadap kebijakan Huntap adalah terpenuhinya kebutuhan dasar akan tempat tinggal yang layak dan aman bagi warga terdampak erupsi Merapi. Adanya kepastian hukum tentang tanah tempat tinggal yang baru berupa sertifikat hak milik, serta adanya Bantuan Dana Rumah (BDR) memungkinkan warga untuk dapat membangun kembali tempat tinggal mereka dan warga juga dapat dengan aman dan nyaman melanjutkan kehidupannya. Selain itu pemerintah juga membangunkan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sangat membantu bagi masyarakat dala proses penyesuaian diri terhadap lingkungan tempat tinggal baru.

c) Akuntabilitas Politik

akuntabilitas politik kebijakan huntap ini belum bisa dikategorikan baik/akuntabel. Dari 3 (tiga) aspek yang dinalalisis yaitu aspek sosial, ekonomi, dan politik hanya aspek sosial yang menunjukkan dampak yang baik dari sisi keamanan lokasi Huntap. Lokasi huntap terasa aman oleh masyarakat karena jauh dari kawasan rawan bencana erupsi Merapi. Akan tetapi rasa aman di huntap belum dibarengi dengan rasa nyaman tinggal di Huntap karena dinamika sosial yang berkembang di Huntap justru menunjukkan perkembangan yang berlawanan dengan nilai-nilai budaya masyarakat desa. Sementara dari aspek ekonomi dan politik dampak yang dirasakan warga belum terasa perubahan yang lebih baik secara ekonomi dan politik. Penghasilan dari warga masyarakat yang meningkat selama tinggal di Huntap ternyata berbanding lurus dengan pengeluaran operasional dan konsumsi yang juga tinggi. Hal ini tentu mengakibatkan perkembangan kesejahteraan masyarakat belum meningkat. Bahkan untuk Huntap Randusari banyak warga yang kembali ke daerah padukuhan asal dengan alasan ekonomi tersebut.

3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kebijakan Huntap

Faktor yang paling mempengaruhi akuntabilitas Kebijakan Huntap adalah kepemimpinan yang pemahaman masyarakat. Kepemimpinan yang mempunyai kapasitas dan kemampuan akan dapat mengarahkan dan mengendalikan semua organ yang dipimpinya untuk satu visi dan misi.

Tugas seorang pemimpin adalah mengatur, mengarahkan, memotivasi, serta mengorkestrakan semua elemen atau organ yang berada dibawah kuasanya untuk melakukan sesuatu rencana yang telah disusun agar tercapai tujuan yang diharapkan. Dengan pengarahannya pembagian tugas yang jelas akan dapat melibatkan semua stakeholder untuk dapat menerima dan terlibat dalam keputusan kebijakan. Sementara faktor pemahaman masyarakat yang baik akan memungkinkan pelaksanaan kebijakan menjadi fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan keadaan (beradaptasi). Kelenturan masyarakat ini yang dapat membuat akuntabilitas sebuah kebijakan atau program bisa menjadi baik/akuntabel

B. Saran

1. Saran Untuk Warga Masyarakat

Keberhasilan pada tingkatan akuntabilitas teknis oleh warga sebagai subjek dalam kebijakan Huntap ini hendaknya menjadi sebuah titik awal untuk membangun sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik. Membangun lingkungan kehidupan tentunya tidak cukup dengan kemampuan dalam membangun fisik unit bangunan rumahnya saja, tetapi juga perlu dikembangkan tatanan sosial di Huntap. Pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan pada saat pelaksanaan pembangunan oleh REKOMPAK harus bisa diterapkan oleh masyarakat agar tujuan dari kebijakan Huntap dapat tercapai yaitu terbentuknya Hunian yang nyaman dan aman bagi warga relokasi Erupsi Merapi 2010. Nyaman dalam arti kata lingkungan yang bersih, sehat, fasilitas umum dan sosial terjaga,

dinamika sosial yang kondusif serta aman dari bencana bahaya erupsi Merapi dimasa-masa yang akan datang.

2. Saran Untuk Pemerintah.

Untuk selalu melakukan evaluasi pada kebijakan yang telah dibuat khususnya kebijakan kebencanaan seperti Kebijakan Huntap bagi korban erupsi Merapi ini. Perencanaan kebijakan bencana harus benar-benar berdasarkan data dan kajian yang matang supaya menghasilkan kebijakan yang akuntabel. Pertimbangan tentang aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek politik harus clear sehingga tidak muncul dampak negatif yang akan timbul sebagai akibat dari kebijakan tersebut. Kebijakan kebencanaan hendaknya mengacu pada kebijakan yang berkelanjutan dari mulai teknis (*input, Output*), Strategis (*outcome*), dan Politik (*impack*) sehingga konflik yang terjadi di masyarakat dapat di minimalisir serta terselesaikan, seperti masalah struktur pemerintahan, adminitrasi kependudukan, ekonimi serta konflik sosial yang lain.